

NASKAH PUBLIKASI

**TATA KELOLA DESA WISATA BERBASIS MASYARAKAT DALAM
PERSPEKTIF *COLLABORATIVE GOVERNANCE***

(Studi Kasus : Desa Terong, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung)

Oleh:

ELA SYAHRANI DAYANTI

20160520077

Telah disetujui dan disahkan sebagai naskah publikasi sesuai kaidah penulisan karya ilmiah

Dosen Pembimbing

Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si.

Nik: 19660828199403163025

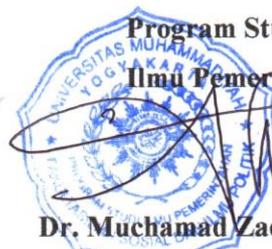
Mengetahui,



**Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik**

Dr. Titim Purwaningsih, S.IP., M.Si.

Nik: 19690822199603163038



**Program Studi
Ilmu Pemerintahan**

Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si.

Nik: 19660828199403163025

TATA KELOLA DESA WISATA BERBASIS MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF *COLLABORATIVE GOVERNANCE*

(Studi Kasus : Desa Terong, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung)

Ela Syahrani Dayanti¹, Muchamad Zaenuri²

Program studi ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email : elasyahrani232@gmail.com, muchamadzaenuri@umy.ac.id

Abstrak

Provinsi Bangka Belitung terutama Kabupaten Belitung memiliki keinginan untuk mengembangkan pariwisata yang ada untuk menjadi sektor unggulan, melalui Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2015 - 2025 (RIPPARDA) digunakan sebagai acuan dalam merencanakan dan mengembangkan sektor pariwisata secara terstruktur, terpadu dan memiliki wawasan pembangunan berkelanjutan serta sangat erat dengan pentingnya peran sektor pariwisata daerah yang sangat disadari oleh berbagai pihak yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai Tata kelola desa wisata berbasis masyarakat dalam perspektif *collaborative governance*. hasil penelitian ini yaitu Tata Kelola Desa Wisata Terong, proses tersebut dimulai dengan *Starting Condition* atau tahap awal yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat melakukan kolaborasi di karenakan mempunyai tujuan yang sama yaitu dalam mendukung sektor pariwisata. Kepemimpinan fasilitatif dalam hal ini pemerintah yang berperan sebagai aktor utama yaitu memfasilitasi para stakeholder. *Desain intitusional* dalam kolaborasi ini yaitu untuk pemerintah dengan stakeholder tidak ada aturan yang mengikat namun saling terbuka sedangkan untuk swasta dan masyarakat terdapat aturan yang tertuang dalam perjanjian kerjasama. Proses kolaborasi dalam tata kelola Desa Wisata Terong dijalankan oleh semua aktor kolaborasi sudah berjalan dengan baik dalam proses kolaborasi Tata Kelola Desa Wisata Terong.

Kata Kunci : Desa Wisata, *Collaborative Governance*

Abstract

Bangka Belitung Province especially Belitung Regency has a desire to develop existing tourism to become a leading sector, through the Regional Tourism Development Master Plan for 2015 - 2025 (RIPPARDA) which is used as a reference in the planning and development of the tourism sector in a structured, integrated and have development insight sustainable and very closely related to the important role of the regional tourism sector which is widely recognized by various parties, namely the government, the private sector and the community. This research uses descriptive qualitative method, this study aims to explain the governance of community-based tourism villages in the perspective of collaborative governance. the results of this study are the Terong Tourism Management Village, the process begins with the Initial Conditions or the initial stages of collaboration between government, private and community because they have the same goal, namely in supporting the tourism sector. Facilitative leadership in this case the government acting as the main actor is to facilitate the stakeholders. The institutional design in this collaboration is that for government and stakeholders there are no binding rules but they are open to each other whereas for the private sector and the community there are rules contained in cooperation agreements. The collaborative process in the management of the Terong Tourism Village is carried out by all collaborative actors who have been well underway in the collaborative process of the Management of the Terong Tourism Village.

Keywords : Tourism Village, *Collaborative Government*

Pendahuluan

Provinsi Bangka Belitung terutama Kabupaten Belitung memiliki keinginan untuk mengembangkan pariwisata yang ada untuk menjadi sektor unggulan. Kabupaten Belitung melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Tahun 2013-2018 telah menetapkan pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalam pembangunan di Kabupaten Belitung dengan tujuannya yaitu dalam pengelolaan pariwisata daerah yang berkualitas yaitu dengan mengembangkan daya tarik wisata melalui tingginya tingkat pemasaran, tingkat kompetensi serta pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan industri pariwisata berbasis masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Belitung Tahun 2015 - 2025 (RIPPARDA) digunakan sebagai acuan dalam merencanakan dan mengembangkan sektor pariwisata secara terstruktur, terpadu dan memiliki wawasan pembangunan berkelanjutan selain itu Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) sangat erat dengan pentingnya peran sektor pariwisata daerah yang sangat disadari oleh berbagai pihak.

Desa Terong merupakan desa wisata memiliki potensi lokal yang kemudian dikembangkan oleh beberapa komunitas masyarakat. Pada tahun 2017 Desa Terong mampu meraih peringkat delapan Desa Wisata kategori *Community Based Tourism* (CBT) tingkat Nasional oleh Kementerian Pariwisata. Keberhasilan yang telah dicapai dari pengembangan pariwisata berbasis masyarakat Dalam konsep Desa Wisata merupakan bentuk peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta. Bentuk dukungan pemerintah dalam pembangunan desa wisata terong ini tidak lepas dari peran penguatan kapasitas masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Belitung kemudian Pengembangan destinasi desa wisata juga turut andil pihak swasta yang memiliki peran sebagai pihak yang menunjang keberhasilan dalam pengembangan desa wisata yaitu pihak swasta PT Bank Central Asia Tbk (BCA).

Permasalahan yang terjadi dalam tata kelola Desa Wisata Kreatif Terong Kabupaten Belitung yaitu belum berjalan sesuai dengan harapan, Hal ini terlihat dari persoalan mendasar yang menjadi kendala pengembangan Desa Wisata Kreatif Terong yaitu masih rendahnya sumber daya manusia (SDM) kemudian pemerintah bertanggungjawab terhadap tata kelola Desa Wisata Terong seharusnya dapat melakukan manajemen yang efektif, dan efisien terkait pelaksanaan dilapangan maupun pembagian tugas dengan para stakeholder, melalui Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Belitung pemerintah berfokus pada kegiatan pendampingan, dan pelatihan. Sedangkan, dari pihak swasta juga melakukan hal yang sama terkait peningkatan SDM berupa pelatihan serta pendampingan, tujuan pemerintah, swasta dalam hal ini sudah terdapat sinkronisasi. Namun ketika pemerintah, swasta melakukan tindakan yang sama, maka menjadikan hal tersebut terkesan tidak efisien.

Pemerintah, dan swasta seharusnya dapat melakukan tindakan yang berkesinambungan, saling keterkaitan, berorientasi pada keberlanjutan agar pembangunan Desa Wisata Terong dari segi fisik maupun intelektual dapat berjalan dengan efektif dan efisien, serta tidak hanya berfokus pada peningkatan SDM tetapi juga terkait pengembangan fisik dari desa. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menjadikan Desa Wisata Terong, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung sebagai studi kasus dalam penelitian ini. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana peran stakeholder dalam tata kelola desa wisata berbasis masyarakat dan pola hubungannya dalam perspektif *collaborative governance*. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peran stakeholder dalam tata kelola desa wisata berbasis masyarakat, dan pola hubungannya dalam perspektif *collaborative governance*.

Metodologi

Metode pada penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau dengan kata lain bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini. dengan penelitian saya ini yaitu mencari data yang berupa kata-kata tertulis ataupun tulisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati kemudian mendeskripsikan, mencatat serta menganalisis dan menginterpretasikan tentang bagaimana peran stakeholder dalam tata kelola desa wisata berbasis masyarakat, dan pola hubungannya dalam perspektif *collaborative governance*. Kemudian untuk menentukan subjek dan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Sumber data yang digunakan menyusun penelitian ini yaitu Sumber Data Primer diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari lapangan yang menjadi obyek penelitian atau diperoleh melalui wawancara dari sumber pertama yang berupa keterangan atau fakta-fakta dan Data sekunder adalah data yang didapat dari keterangan atau pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Teknik Pengumpulan Data pada penelitian ini yaitu menggunakan Wawancara Penelitian dan Dokumen atau Bahan Pustaka kemudian untuk teknik analisis data yang di gunakan yaitu reduksi data, Penyajian data dan Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi.

Pembahasan

Collaborative governance yang dilaksanakan dalam pengelolaan Desa Wisata Terong ini dapat dilihat dari model kolaborasi menurut Anshel And Gash, dalam kolaborasi terdapat tiga peran aktor utama yang melakukan kolaborasi yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung, PT Bank Central Asia Tbk dan masyarakat Desa Wisata Terong, Kabupaten Belitung. konsep Tata Kelola Desa Wisata Berbasis Masyarakat Dalam Perpektif *Collaborative Governance* dapat di jelaskan dengan indentifikasi secara konseptual, maka yang menjadi karakteristik dalam *collaborative Governance* yaitu *starting condition* (tahap awal), kepemimpinan fasilitatif, *institutional design* (desain institusional), dan proses kolaborasi. Untuk memahami konseptual dari perspektif *collaborative governance* dalam kolaborasi pengelolaan desa wisata berbasis masyarakat maka dapat dijabarkan secara mendalam, untuk memahami konseptual tersebut maka dapat di jelaskan dari hasil wawancara maupun dokumentasi. Adapun konseptual tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Starting Condition (kondisi awal)

A. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (pemerintah)

Kondisi awal yang melatar belakangi kolaborasi dari pihak pemerintah pada pengelolaan Desa Wisata Terong yaitu sesuai dengan tanggung jawab untuk mendorong sektor pariwisata untuk mengembangkan Destinasi pariwisata dan sebagai fasilitator dalam pengelolaan Desa Wisata terong. Dinas Pariwisata sebagai instansi pemerintahan yang mendapat arahan sesuai dengan program Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung yaitu program Tunase atau satu desa satu destinasi berkewajiban untuk mencari potensi-potensi desa yang ada di Kabupaten Belitung untuk di kembangkan dan digali menjadi desa wisata yang diantara desa-desa yang ada di Kabupaten Belitung yaitu Desa Terong terpilih menjadi desa wisata dikarenakan Desa Terong memiliki banyak potensi yang cocok untuk dikembangkan dan didorong untuk menjadi desa wisata.

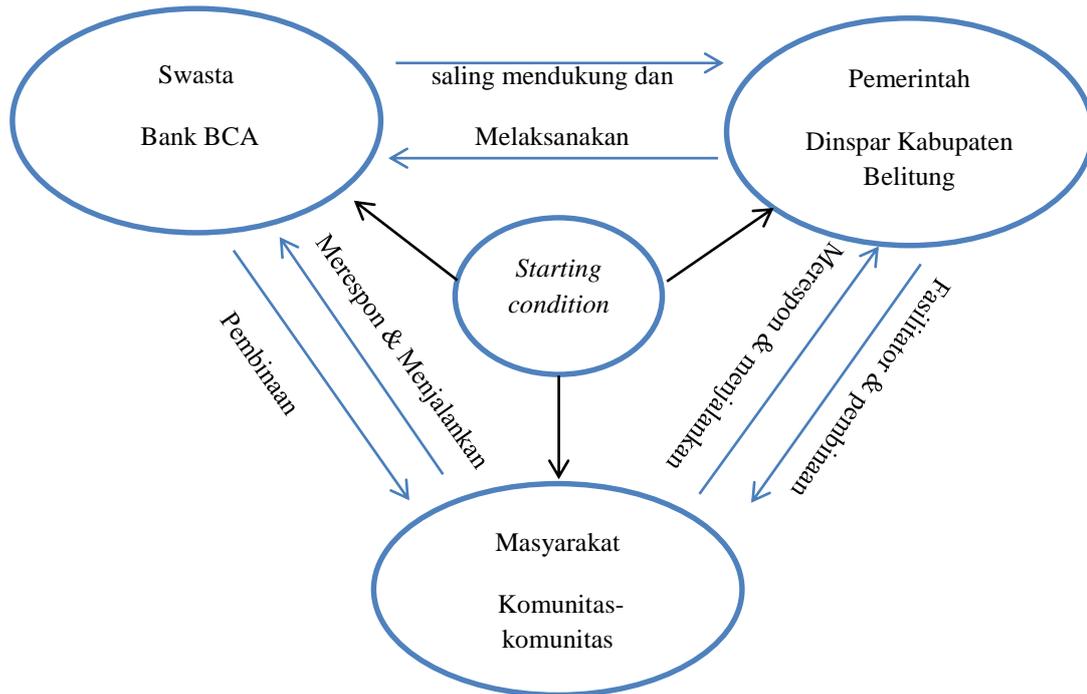
B. Bank BCA (Swasta)

Keterlibatan swasta dalam kolaborasi pada pengelolaan Desa Wisata Terong ini dengan tujuan dalam rangka mendorong sektor pariwisata sehingga pada kondisi awal bank BCA (swasta) pada tahun 2018 *Corporate Social Responsibility* (CSR) masuk dalam hal peningkatan sumber daya manusia pariwisata dan juga peningkatan sarana wisata. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) melalui program Bakti BCA(CSR) berkomitmen untuk mendukung keberlangsungan pariwisata berkualitas di Indonesia dengan membina sejumlah desa/komunitas di pelosok Tanah Air. salah satunya Desa Wisata Terong, Kabupaten Belitung.

C. Masyarakat

Keterlibatan masyarakat pada kondisi awal kolaborasi yang dilakukan yaitu masyarakat mulai sadar akan pariwisata sehingga masyarakat mulai merubah pola pikir dan melihat potensi-potensi yang dimiliki dari desa mereka untuk di kembangkan menjadi destinasi wisata hal ini merupakan salah satu tujuan dalam mendukung dan mengembangkan sektor pariwisata. Adapun keterlibatan masyarakat dalam kolaborasi pada kondisi awal yaitu dalam pengelolaan Desa Wisata Terong ini sebegus apapun sebuah program apabila masyarakat lokal tidak di berikan pemahaman dan merubah pola pikir masyarakat maka itu tidak akan pernah berhasil, maka dari itu masyarakat merasa butuh di berikan pemahaman penguatan tentang bagaimana pengembangan sumber daya manusia (SDM) Dalam Pengelolaan Desa Wisata Terong.

Bagan 4.1 Pola Kolaborasi Starting Condition (Kondisi Awal)



Sumber : Hasil Temuan Lapangan, 2020

Dari indentifikasi pola kolaborasi yang dilakukan oleh para stakeholder dalam *starting condition* atau kondisi awal menunjukan bahwa hubungan ketiga stakeholder tersebut saling merespon dalam hubungan kolaborasi. keterlibatan stakeholder dalam hubungan kolaborasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah yaitu Dinas Pariwisata berkewajiban untuk mengembangkan destinasi pariwisata dengan mencari potensi-potensi yang ada di desa untuk di kembangkan menjadi destinasi wisata serta menjadi fasilitator dalam pariwisata tersebut sedangkan pihak swasta terlibat dalam Desa Wisata Terong tersebut yaitu dalam mendukung pemerintah dalam sektor pariwisata yaitu dengan menjalankan program CSR (*corporate social responsibility*) yang di implementasikan BCA di desa binaannya dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta memberikan bantuan berupa sarana parasana kemudian untuk keterlibatan masyarakat dalam hal ini yaitu komunitas-komunitas yang ada mencoba untuk mengikuti dari kegiatan dari berbagai macam pelatihan yang di laksanakan oleh baik pemerintah maupun swasta.

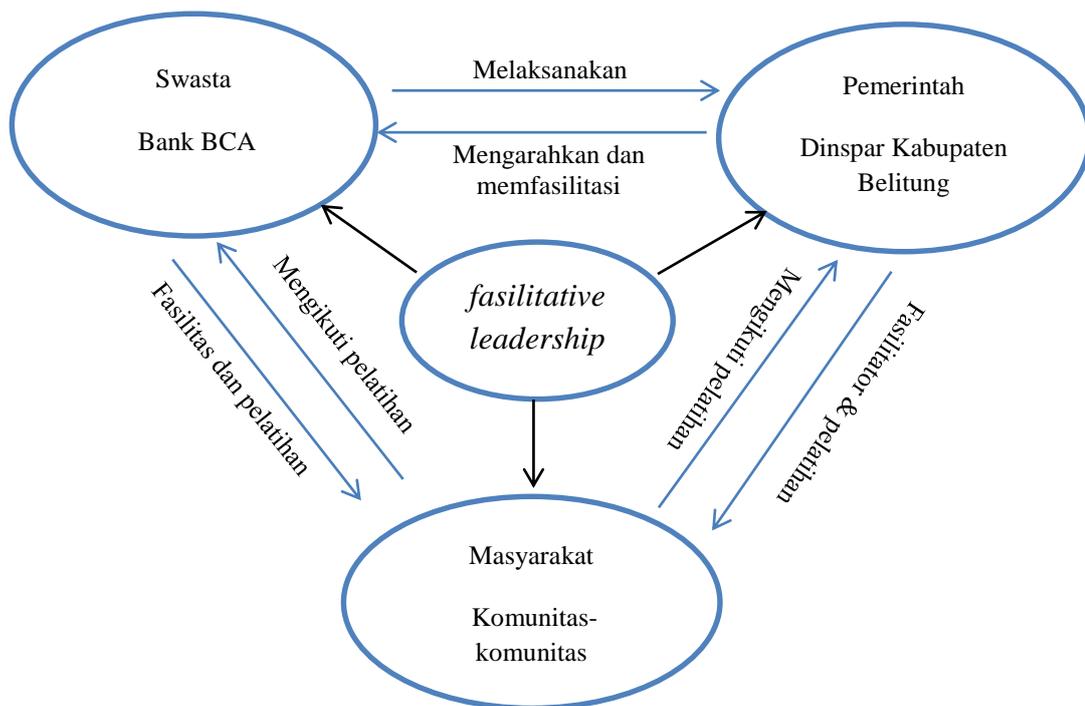
2. Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan fasilitatif yaitu menjelaskan bagaimana peran kepemimpinan seorang pemimpin dalam melakukan proses kolaborasi. Kepimpinan yang fasilitatif sangat dibutuhkan dalam proses kolaborasi karena merupakan sebagai ujung tombak tingkat keberhasilan suatu kolaborasi. Seorang pemimpin dalam proses kolaborasi harus memberikan fasilitas dalam memberikan kesempatan bagi setiap aktor untuk melakukan dialog serta membangun sebuah kepercayaan antar aktor dan juga menetapkan aturan-aturan dalam proses kolaborasi. Sukses atau tidaknya suatu kolaborasi tergantung pada setiap pemimpin untuk bisa dalam memamanajemenkan kolaborasi agar berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kepemimpinan dalam proses kolaborasi yang dilaksanakan di Desa Wisata Terong ini yaitu Dinas Pariwisata sebagai aktor yang berpengaruh dalam penyelenggaraan pariwisata memiliki peran

penting serta tanggung jawab sebagai fasilitator dengan membina, menggerakkan serta melaksanakan pelatihan-pelatihan.

Fasilitas serta arahan yang diberikan oleh pemerintah diharapkan dapat di respon oleh para stakeholder seperti keterlibatan pihak swasta yaitu BCA dalam hal ini yaitu membantu pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat berorientasi pada kualitas pelayanan unggul kepada wisatawan serta beragam pelatihan- pelatihan dalam rangka mengembangkan potensi desa dengan beberapa pelatihan kepada masyarakat seperti layanan prima, standar layanan, *creative selling skill*, dan *golden heart leadership*. Sedangkan Respon masyarakat dalam rangka mendukung serta membantu pemerintah dalam sektor kepariwisataan dari pihak masyarakat yaitu di wakili oleh komunitas-komunitas yang terlibat dalam mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilakukan baik pemerintah maupun pihak swasta. Dari uraian keterlibatan stakeholder dalam kepemimpinan fasilitatif dalam proses kolaborasi ini peran kepemimpinan yang sangat dominan merupakan peran kepemimpinan oleh Pemerintah yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung dalam tata kelola Desa Wisata Terong.

Bagan 4.2 Pola Kolaborasi *Fasilitative Leadership* (Kepemimpinan Fasilitatif)



Sumber : Hasil Temuan Lapangan, 2020

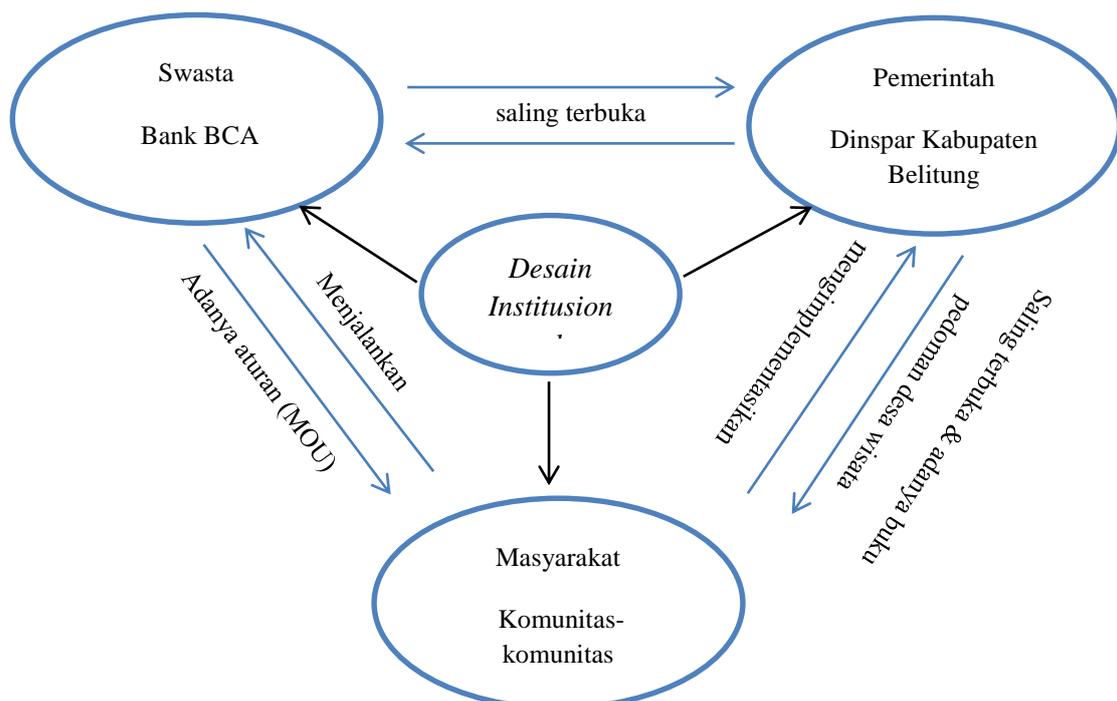
Dari hasil indentifikasi pola kolaborasi *fasilitative leadership* (kepemimpinan fasilitatif) yang dilakukan oleh ketiga stakeholder pada kepemimpinan yaitu dapat disimpulkan bahwa pemerintah lebih mendominasi dalam kepemimpinan fasilitatif yaitu pemerintah mencoba mengarahkan dan memfasilitasi seperti dalam hal mengarahkan pihak swasta terlibat dalam hal membantu dalam penguatan sumber daya manusia dalam mendukung sektor pariwisata serta memberikan fasilitas berupa pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah dan swasta.

3. Desain Institusional

Setelah tahap *starting condition* atau kondisi awal dan kepemimpinan fasilitatif, maka tahap selanjutnya yang dilakukan dalam kolaborasi yaitu *desain institusional*, *desain institusional* yaitu merupakan suatu aturan dasar yang digunakan oleh para pemangku kepentingan untuk melihat legitimasi prosedural dalam pengelolaan proses kolaborasi, dengan mempunyai aturan yang jelas dan prosesnya terbuka. Aturan dasar pada pengembangan pariwisata sangat penting yang digunakan sebagai acuan dalam mengelola pariwisata.

kolaborasi *Desain Institusional* yang dilakukan oleh ketiga stakeholder yaitu adanya peran pengeluaran aturan dari masing-masing pihak seperti halnya untuk pemerintah dan swasta hanya bersifat saling terbuka, sedangkan untuk kolaborasi pengeluaran aturan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat bersifat terbuka dan tidak ada aturan yang mengikat dalam kolaborasi yang dilakukan dan hanya berpegang pada buku pedoman terbitan Kementerian Pariwisata dan di implementasikan pada pengelolaan Desa Wisata Terong, sedangkan dalam pengeluaran aturan yang dilakukan oleh pihak swasta dan masyarakat yaitu adanya MOU atau perjanjian kerja sama yang disepakati dan dilaksanakan secara bersama-sama dalam kolaborasi. Dalam hal ini proses kolaborasi antara masyarakat dan swasta mempunyai aturan yang jelas dan prosesnya terbuka dengan adanya saling berkomunikasi dan koordinasi. Adapun perjanjian kerja sama Diatur dalam MOU yaitu Ruang lingkup antar pihak, Jangka waktu kesepakatan, Hak dan kewajiban para pihak, Pemberitahuan dan permintaan berkaitan dengan kesepakatan, Pengakhiran kesepakatan, Penyelesaian perselisihan dan lain-lain. Sehingga jelas bahwa dalam proses kolaborasi antara swasta dan masyarakat adanya aturan dalam proses kolaborasi yaitu MOU, sehingga dalam *desain institusional* pengeluaran aturan proses kolaborasi dilakukan oleh masing masing pihak-pihak dalam tata kelola desa wisata terong bersifat terbuka.

Bagan 4.3 Pola Kolaborasi Desain Institusional



Sumber : Hasil Temuan Lapangan, 2020

Dari hasil indentifikasi pola kolaborasi *Desain Institusional* yang dilakukan oleh ketiga stakeholder yaitu adanya peran pengeluaran aturan dari masing-masing pihak seperti halnya untuk pemerintah dan swasta hanya bersifat saling terbuka sedangkan untuk kolaborasi pengeluaran aturan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat bersifat terbuka dan tidak ada aturan yang mengikat dalam kolaborasi yang dilakukan dan hanya berpegang pada buku pedoman terbitan Kementerian Pariwisata dan di implementasikan pada pengelolaan Desa Wisata Terong, sedangkan dalam pengeluaran aturan yang dilakukan oleh pihak swasta dan masyarakat yaitu adanya MOU atau perjanjian kerja sama yang disepakati dan dilaksanakan secara bersama-sama dalam kolaborasi.

4. Proses Kolaborasi

Setelah penjabaran dari kolaborasi antar stakeholder yang dimulai dari kolaborasi *starting condition* (kondisi awal), *fasilitative leadership* (kepemimpinan fasilitatif) dan *Desain Institusional*, maka untuk tahapan selanjutnya yaitu proses kolaborasi. Pada penjelasan pada pengelolaan Desa Wisata Terong yang dilakukan dari *collaborative governnace* yaitu meliputi :

- a. *Face to face* (dialog tatap muka)
- b. *Trust building* (membangun kepercayaan)
- c. *Commitment to process* (komitmen terhadap proses)
- d. *Share understanding* (pemahaman bersama)

Adapun untuk untuk memperjelas model pada tahan proses kolaborasi dalam pengelolaan Desa Wisata Terong dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. *face to face* atau dialog tatap muka

Face to face atau dialog tatap muka langsung merupakan suatu hal yang sangat penting dalam melakukan proses kolaborasi Tata Kelola Desa Wisata Terong yang dilakuan oleh para stakeholder, Tanpa adanya pertemuan atau dialog secara langsung maka poses kolaborasi tidak akan bisa berjalan dengan baik. Pada pengelolaan Desa Wisata Terong dialog tatap muka langsung atau pertemuan yang diadakan secara langsung oleh para pemangku kepentingan yang terdiri dari rapat atau memberikan pelatihan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama atau langsung antar stakeholder.

Dalam penelitian ini, yaitu tentang proses kolaborasi yang yang dilakukan oleh pemerintah swasta dan masyarakat yaitu seperti adanya memberikan pelatihan contoh seperti dalam rangka mengembangkan potensi dan meningkatkan kualiatas sumber daya manusia yang di implementasikan BCA melalui program solusi bisnis unggul dengan menggelar pelatihan standar layanan bagi pengurus desa wisata Terong maka disini turut hadir kepala dinas pariwisata kabupaten belitung dan jajarannya beserta para pengurus Desa Wisata terong yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus hingga 29 Agustus 2018 merupakan adanya saling koordinasi dan tatap

muka secara langsung antara pihak swasta, masyarakat dan pemerintah dalam melakukan pelatihan yang dilakukan oleh para stakeholder.

b. *Trust building* (membangun kepercayaan)

Membangun kepercayaan yaitu bahwa pihak yang terlibat mempunyai niatan yang sama untuk mengambil suatu kebijakan yang terbaik untuk semua pihak (Anshel and Gash, 2007) *Trust building* dimulai dengan membangun komunikasi antar berbagai pihak yang terlibat dalam mendukung upaya saling membangun kepercayaan. Dalam proses kolaborasi membangun kepercayaan sangat dibutuhkan oleh para stakeholder dalam pengelolaan Desa Wisata Terong ini, setiap stakeholder yang terlibat dalam proses kolaborasi harus saling percaya, sehingga proses kolaborasi yang dijalankan oleh para stakeholder berjalan dengan baik.

Membangun sebuah kepercayaan yang dilakukan oleh para stakeholder yang terlibat pada pengelolaan Desa Wisata Terong ini yaitu adanya saling koordinasi dengan membangun sebuah komunikasi, untuk menumbuhkan rasa saling percaya antar stakeholder pemerintah yaitu kami Dinas Pariwisata membuka forum *meeting* dengan stakeholder dalam peningkatan pariwisata di Belitung yang mengundang masyarakat dan pihak swasta yang terlibat seperti disini misalnya swasta yang terlibat dalam pengelolaan Desa Wisata Terong yaitu pihak BCA. kemudian Terbangunnya sebuah kepercayaan antara stakeholder tidak lepas dari terjalinnya komunikasi yang intens yang dibangun oleh para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan Desa Wisata Terong. Membangun kepercayaan dengan adanya Monitoring dan Evaluasi serta adanya Konsolidasi dalam pengelolaan Desa Wisata Terong. membangun kepercayaan antara stakeholder dengan tatap muka secara langsung dan terjadinya komunikasi antara stakeholder dalam pengelolaan Desa Wisata Terong berdampak pada keterbukaan dari masing-masing stakeholder sehingga memunculkan suatu kepercayaan yang terjadi antara stakeholder yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat.

c. *commitment to process* atau komitmen terhadap proses

Setelah dialog tatap muka dan membangun kepercayaan maka tahap selanjutnya dalam proses kolaborasi pada Tata Kelola Desa Wisata Terong ini yaitu komitmen terhadap proses. Komitmen terhadap proses merupakan suatu komitmen yang dijalankan dalam pelaksanaan proses kolaborasi guna dalam mencapai suatu tujuan keinginan bersama oleh para stakeholder, dengan berbagi komitmen dan saling terbuka satu sama lain. Komitmen dapat menentukan keberhasilan dalam proses kolaborasi yaitu bergantung pada kepada kepercayaan aktor terhadap aktor lainnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing pada suatu kolaborasi. Seperti halnya swasta yaitu BCA dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan program bakti BCA merupakan suatu komitmen PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dalam rangka mendorong sektor pariwisata. BCA merupakan sebagai aktor yang berperan sebagai mediator melalui volunteer atau sukarelawan sebagai pelaksana dilapangan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang kebutuhan dalam pengelolaan Desa Wisata Terong, selain itu Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung

juga mempunyai komitmen yang sangat kuat dalam pengelolaan Desa Wisata Terong, hal ini dapat dilihat dari visi misi Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung.

Kemudian komitmen ini sudah menjadi kesadaran dinas sebagai pemerintah untuk memfasilitasi Desa Wisata Terong dengan melibatkan swasta dalam program yang dilakukan oleh BCA. Begitupun komitmen yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wisata Terong secara tegas tertuang dengan adanya perjanjian kerja sama antara PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dengan pengelola Desa Wisata Terong. Segala komitmen yang secara tegas tertuang dalam perjanjian kerja sama segala prateknya memang dijalankan sesuai dengan ketentuan atau aturan-aturan yang sudah disepakati sebelumnya, sehingga komitmen terhadap proses dalam *collaborative governance* pada tata kelola Desa Wisata Terong ini muncul karena adanya saling percaya antar stakeholder baik itu dari pemerintah, swasta dan masyarakat.

d. *Share understanding* (pemahaman bersama)

Share understanding atau pemahaman bersama merupakan suatu sikap yang sangat penting karena dalam menjalankan beberapa proses kolaborasi dibutuhkan sikap saling memahami agar cita-cita dari bentuknya kolaborasi dapat tercapai. *Share understanding* atau pemahaman bersama sangatlah krusial apalagi dalam *collaborative governance*, hal ini dikarenakan aktor-aktor yang terlibat yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat berasal dari berbagai bidang dengan masing-masing pemikiran yang berbeda-beda.

collaborative governance dalam tata kelola Desa Wisata Terong dimana aktor-aktor yang terlibat mempunyai perbedaan bidang pengetahuan dan sumber daya. Kolaborasi yang dilakukan antar stakeholder sangat jelas mempunyai spesifikasi pada masing-masing dirinya, sehingga diperlukan sikap untuk saling memahami dalam melaksanakan proses kolaborasi. Adapun sikap saling memahami identik dengan adanya komunikasi yang terjalin, dengan komunikasi inilah semua stakeholder akan saling berbagi informasi dan pengetahuan dalam proses kolaborasi seperti halnya adanya komunikasi yang dilakukan biasanya berbagi informasi dalam acara rapat koordinasi serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan 2x dalam setahun dan melakukan Konsolidasi baik dengan pihak pemerintahan maupun masyarakat merupakan adanya komunikasi yang baik terjalin antar stakeholder serta meningkatkan dan menjaga hubungan baik dengan para stakeholder dalam melakukan hubungan kerja sama dalam pengelolaan Desa Wisata Terong.

Kesimpulan

Bersadarkan hasil temuan lapangan terkait dengan tata kelola desa wisata berbasis masyarakat dalam perspektif *colaborative governance* dapat disimpulkan bahwa, pemerintah daerah yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung dan para skateholder yaitu swasta yaitu Bank BCA dan masyarakat telah melakukan proses kolaborasi dalam Tata Kelola Desa Wisata Terong, proses tersebut yaitu

1. *Starting Condition* atau tahap awal yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat melakukan kolaborasi di karenakan mempunyai tujuan yang sama yaitu dalam mendukung sektor pariwisata.

2. Kepemimpinan fasilitatif dalam hal ini pemerintah yang berperan sebagai aktor utama yaitu memfasilitasi para stakeholder, sedangkan kepemimpinan swasta dalam kolaborasi yaitu berperan sebagai pembina dalam program yang mereka laksanakan.
3. *Desain intitusional* dalam kolaborasi ini yaitu untuk pemerintah dengan stakeholder tidak ada aturan yang mengikat namun saling terbuka sedangkan untuk swasta dan masyarakat terdapat aturan yang tertuang dalam perjanjian kerjasama.
4. Proses kolaborasi dalam tata kelola Desa Wisata Terong dijalankan oleh semua aktor kolaborasi sudah berjalan dengan baik dengan adanya dialog tata muka bersama pada saat melakukan kolaborasi kemudian adanya saling kepercayaan dan komitmen yang dibangun dari masing-masing stakeholder dalam proses kolaborasi, serta adanya sikap saling memahami yang terjalin antara stakeholder dalam proses kolaborasi Tata Kelola Desa Wisata Terong.

Daftar Pustaka

- Ansell, Chriss dan Alison Gash. 2007. Collaborative Govetnance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Administration Research and Theory*
- Belitongbetuah.Com. (2019). [Bca Resmikan Dua Desa Binaan Untuk Menunjang Pariwisata](http://www.belitongbetuah.com/berita/bca-resmikan-dua-desa-binaan-untuk-menunjang-pariwisata.html) (16 november 2019) diakses dari <http://www.belitongbetuah.com/berita/bca-resmikan-dua-desa-binaan-untuk-menunjang-pariwisata.html> diakses pada tanggal (28 november 2019)
- Dewi Apriliana Puspita Merlin (2019) “Tata Kelola Pariwisata Berbasis Masyarakat Di Obyek Wisata Puncak Becici Desa Muntuk, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul Tahun 2017-2018.” Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Harmawan, B. N. (2017). Collaborative Governance dalam Program Pengembangan Nilai Budaya Daerah Melalui Banyuwangi Ethno Carnival.
- Kemenpar.go.id. (2019). Siaran Pers : Soft Launching Desa Wisata Kreatif Terong. (16 november 2019) diakses <http://www.kemenpar.go.id/post/siaran-pers-soft-launching-desa-wisata-kreatif-terong> diakses pada tanggal (28 november 2019)
- Mudana, I. W. (2015). Pemberdayaan Masyarakat di Daerah Tujuan Wisata Desa Pemuteran Dalam Rangka Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan. Bali: *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, vol 4, no 2. hlm 596-608.
- Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Belitung Tahun 2015 - 2025 (RIPPARDA)
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabuapten Belitung Tahun 2013-2018
- Tajudin, Jejen (2018). Strategi Pengembangan Desa Wisata Di Manggunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADES) Desa Manggunan, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Zaenuri, Muchamad.(2018). Tata Kelola Pariwisata Bencana Berbasis Collaborative Governance, Yogyakarta